

BAB II
GAMBARAN UMUM
OBJEK PENELITIAN

2.1 Sejarah Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Wonogiri

Perkembangan awal berdirinya fitur terbaru dengan sistem keuangan desa atau siskeudes yang didirikan secara langsung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bermula dari tahun 2017 sehingga pada bulan April Tahun 2018, menerbitkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Pengelelolaan Keuangan Desa Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan menggunakan pedoman peraturan yang terbaru. Namun pada awal mula berdirinya fitur terbaru aplikasi sistem keuangan desa, tidak langsung diterima oleh semua pegawai yang berkaitan dengan pekerjaan desa, hal ini dikarenakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengetahui bahwasannya sumber daya manusia kurang memadai sehingga masih membutuhkan proses yang panjang guna memahami alur dan prosedur pemakaian aplikasi Sistem Keuangan Desa tersebut. Seiring berjalannya waktu yang awal mulanya sistem terbaru terbit di tahun 2018, aplikasi sistem keuangan desa baru berkembang pesat dan diterima di wilayah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2019 sehingga sistem keuangan desa tersebut digunakan sebagai standar pengelolaan yang baru di era global ini yang menjadikan lebih transparansi dalam pengelolaan keuangan desa serta tujuan utamanya salah satunya adalah transparansi. Transparansi dilakukan guna untuk meminimalisir terjadinya kasus korupsi keuangan desa.

Pada tahun 2019, Bupati Kabupaten Wonogiri telah mengeluarkan peraturan resmi tentang sistem penyelenggara keuangan desa atau sistem keuangan desa yaitu Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang sistem keuangan desa, yang dimana terdapat pasal 37 ayat (3) dan 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan dua cara atau dua metode, antara lain metode online dan metode manual. Hal ini dikarenakan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa terbilang masih baru dan membutuhkan penyesuaian serta adaptasi terhadap aplikasi tersebut. Proses adaptasi tersebut dilakukan dengan beberapa proses, seperti mengadakan workshop di pendopo

Kabupaten Wonogiri terkait penggunaan sistem keuangan desa dengan fitur terbaru yang dihadiri secara langsung oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wonogiri. Kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan dan bimbingan secara teknis maupun non teknis kepada pendamping desa-desa dilakukan secara berkala serta mengundang beberapa camat sebagai sample pelatihan sistem keuangan desa agar pendamping desa segera memahami penggunaan fitur terbaru aplikasi sistem keuangan desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) adalah dinas yang berhubungan dengan segala pekerjaan desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa juga merupakan dinas yang mendapatkan amanah sebagai aktor utama sekaligus penanggung jawab pemegang fitur sistem keuangan desa. Sejak diterapkan unit pengelolaan keuangan desa yang terbaru pada tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa belum bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang menunjang keberhasilan sistem pengelolaan keuangan yang terbaru, hal ini dikarenakan sistem yang masih tergolong baru sehingga masih bertitik fokus pada satu penanggung jawab serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai uji coba, berhasil tidaknya melaksanakan unit pengelolaan keuangan terbaru tersebut. Kemudian apabila Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) di Kabupaten Wonogiri dapat menjalankan sistem terbaru pengelolaan keuangan tersebut dengan bijak serta berhasil, maka langkah selanjutnya adalah bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang kedepannya dapat mencapai melebihi target yang telah ditentukan oleh pihak Kabupaten Wonogiri. Setelah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mengetahui bahwa dinas tersebut sebagai penanggung jawab, dinas tersebut secara otomatis segera menyusun rencana-rencana yang akan dilaksanakan guna menunjang keberhasilan sistem tersebut tersebut, diantaranya yaitu mengamanahkan petugas pendamping desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mengadakan pelatihan dan bimbingan kepada seluruh pendamping desa se-kecamatan yang berada di Kabupaten Wonogiri, agar kedepannya para pendamping desa sektor kecamatan dapat terjun langsung ke semua wilayah desa-desa bimbingannya. (*sumber: bpkp.go.id*)

Sebelum meluncurnya unit baru yaitu sistem keuangan desa yang berbasis aplikasi yang diturunkan oleh kementerian desa, semua pekerjaan dilakukan secara manual berbeda dengan sistem yang terbaru yang menggunakan sistem online yang berbasis aplikasi. Pemangku yang mengelola keuangan desa ialah bendahara desa, bendahara desa yang

mempunyai semua pekerjaan berkaitan dengan keuangan. Ketika semua pekerjaan masih dilakukan dengan berbasis manual, maka yang terjadi adalah berlimpahnya pekerjaan yang tertunda, sedangkan dengan adanya fitur pengeluaran terbaru unit keuangan desa dapat mempermudah pekerjaan bendahara desa serta keamanan terjaga sehingga meringankan risiko tinggi terjadinya kerugian dan penyelewengan dana desa.

2.2 Sistem Keuangan Desa di Kecamatan Girimarto

Kecamatan Girimarto adalah salah satu kecamatan yang memiliki 12 Desa yang terdiri dari beberapa desa yaitu, Desa Bubakan, Desa Doho, Desa Girimarto, Desa Giriwarno, Desa Jatirejo, Desa Jendi, Desa Nungkulan, Desa Sanan, Desa Semagar dan Desa Tambakmerang, serta Desa Waleng. Kawasan Kecamatan Girimarto juga termasuk kelompok kecamatan yang seluruh wilayahnya menerapkan sistem keuangan desa berbasis aplikasi online. Kecamatan Girimarto terletak di ketinggian 500 mdpl dan mempunyai luas wilayah 6.236,68 ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 48.631 jiwa, laki-laki 24.563 jiwa dan 24.068 jiwa untuk perempuan serta mempunyai batas wilayah sebagai berikut,

Sebelah Utara : Kabupaten Karanganyar

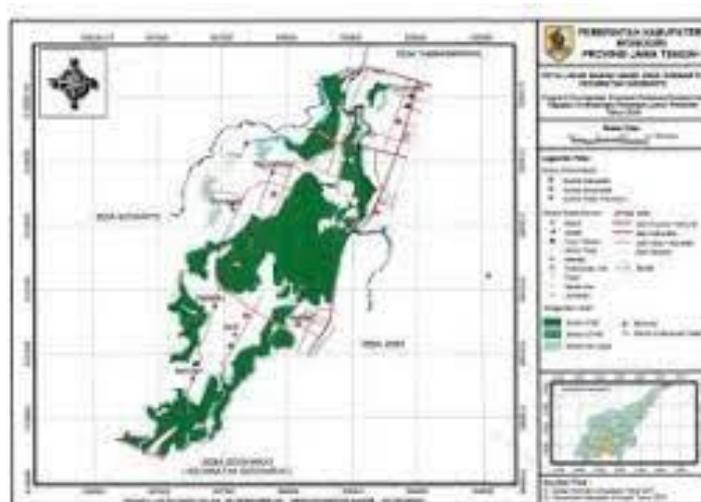
Sebelah Timur : Kecamatan Jatipurno

Sebelah Selatan : Kecamatan Sidoharjo

Sebelah Barat : Kecamatan Ngadirojo

Gambar 2.1

Peta Wilayah Kecamatan Girimarto



(Sumber : Girimarto.wonogirikab.go.id)

Potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Girimarto ialah potensi dibidang perekonomian dan di bidang pariwisata. Di bidang perekonomian digerakkan oleh beberapa sektor, seperti perdagangan, jasa, industri rumahan dan sektor pertanian serta kecamatan ini dikenal juga sebagai penghasil ketela pohon, kakao, ketela dan cengkih. Tidak hanya hal itu, industri rumahan yang tekuni oleh masyarakat sekitar diantaranya pembuatan batu bata, genteng dan makanan olahan seperti pembuatan kripik tempe yang menjadikan ciri khas industri makanan. Potensi di bidang pariwisata, kecamatan girimarto merupakan wilayah yang mempunyai dataran rendah maupun dataran tinggi yang kaya akan kekayaan alam yang melimpah terutama di Desa Bubakan yang terletak di dataran tinggi dan memiliki wisata alam bernama danau muncar. Kecamatan Girimarto juga termasuk 10 besar kecamatan yang mendapatkan dana desa tertinggi se-kabupaten Wonogiri.

Berikut data Dana Desa dan Anggaran Dana Desa yang berada di Kabupaten Wonogiri :

Tabel 2.1
Perbup Nomor 49 Tahun 2020
Tentang Dana Desa dan Anggaran Dana Desa
di Kabupaten Wonogiri

NO	KECAMATAN	DESA		DANA DESA	ADD
1	Baturetno	1	Balepanjang	988.498.000	522.984.000
		2	Baturetno	818.252.000	677.516.000
		3	Belikurip	832.676.000	527.075.000
		4	Boto	848.883.000	425.766.000
		5	Gambiranom	794.874.000	586.312.000
		6	Glesungrejo	793.051.000	493.319.000
		7	Kedungombo	802.946.000	517.338.000
		8	Saradan	817.350.000	517.751.000
		9	Sendangrejo	943.738.000	517.392.000
		10	Setrorejo	1.227.304.000	546.188.000
		11	Talunombo	786.610.000	514.064.000
		12	Temon	761.480.000	415.845.000
		13	Watuagung	749.037.000	522.463.000
2	Batuwarno	1	Batuwarno	760.138.000	507.805.000
		2	Kudi	817.447.000	464.092.000
		3	Ronggojati	772.653.000	464.199.000
		4	Sendangsari	788.151.000	498.453.000
		5	Sumberagung	744.945.000	459.905.000
		6	Sumberejo	778.655.000	532.014.000
		7	Tegiri	1.065.008.000	729.858.000
3	Bulukerto	1	Bulurejo	777.157.000	546.584.000
		2	Conto		

				799.483.000	541.762.000
		3	Domas	764.295.000	469.216.000
		4	Geneng	795.879.000	495.442.000
		5	Krandegan	748.714.000	538.291.000
		6	Nadi	779.658.000	405.310.000
		7	Ngaglik	1.091.846.000	472.969.000
		8	Sugihan	808.433.000	422.006.000
		9	Tanjung	752.585.000	444.392.000
4	Eromoko	1	Baleharjo	795.085.000	500.009.000
		2	Basuhan	819.686.000	660.849.000
		3	Eromoko	759.167.000	502.946.000
		4	Minggarharjo	833.726.000	566.613.000
		5	Ngandong	819.984.000	583.774.000
		6	Ngunggahan	774.006.000	538.556.000
		7	Panekan	1.008.471.000	483.746.000
		8	Pasekan	832.807.000	641.553.000
		9	Pucung	854.994.000	704.855.000
		10	Sindukarto	754.054.000	537.815.000
		11	Sumberharjo	781.188.000	547.447.000
		12	Tegalharjo	809.285.000	402.011.000
		13	Tempurharjo	809.290.000	582.144.000
5	Girimarto	1	Bubakan	1.033.416.000	567.027.000
		2	Doho	776.096.000	449.641.000
		3	Girimarto	910.256.000	527.881.000
		4	Giriwarno	774.492.000	454.279.000
		5	Jatirejo	783.003.000	488.094.000
		6	Jendi	742.638.000	528.751.000

		7	Nungkulan	749.784.000	444.489.000
		8	Sanan	843.934.000	465.405.000
		9	Selorejo	769.880.000	493.368.000
		10	Semagar	1.157.163.000	500.716.000
		11	Tambakmerang	747.513.000	557.455.000
		12	Waleng	768.971.000	523.628.000
6	Giritontro	1	Jatirejo	802.829.000	503.555.000
		2	Ngargoharjo	833.553.000	587.540.000
		3	Pucanganom	1.527.273.000	780.146.000
		4	Tlogoharjo	878.130.000	557.674.000
		5	Tlogosari	860.002.000	613.304.000
7	Giriwoyo	1	Bulurejo	921.963.000	483.769.000
		2	Bumiharjo	1.282.816.000	454.890.000
		3	Gedongrejo	901.067.000	528.116.000
		4	Guwotirto	804.643.000	527.721.000
		5	Ngancar	773.903.000	424.491.000
		6	Pidekso	1.021.153.000	455.685.000
		7	Platarejo	807.568.000	488.777.000
		8	Sejati	770.197.000	556.087.000
		9	Selomarto	777.355.000	473.987.000
		10	Sendangagung	772.573.000	503.113.000
		11	Sirnoboyo	800.746.000	493.491.000
		12	Tawangharjo	871.624.000	546.441.000
		13	Tirtosuworo	802.911.000	571.051.000
		14	Tukulrejo	764.587.000	528.163.000
8	Jatipurno	1	Girimulyo	1.059.501.000	403.054.000
		2	Giriyoso	1.092.187.000	567.370.000

		3	Jatipurwo	765.431.000	488.497.000
		4	Jeporo	897.768.000	616.340.000
		5	Kembang	867.207.000	469.464.000
		6	Kopen	1.077.736.000	679.094.000
		7	Mangunharjo	784.558.000	552.819.000
		8	Slogoretno	735.302.000	455.266.000
		9	Tawangrejo	765.911.000	563.259.000
9	Jatiroto	1	Boto	756.741.000	449.634.000
		2	Brenggolo	801.442.000	500.040.000
		3	Cangkring	935.732.000	439.694.000
		4	Dawungan	1.077.280.000	432.120.000
		5	Duren	774.451.000	375.693.000
		6	Guno	768.359.000	440.034.000
		7	Jatirejo	1.131.009.000	552.352.000
		8	Mojopuro	1.150.938.000	498.423.000
		9	Ngelo	764.930.000	406.327.000
		10	Pengkol	991.676.000	459.870.000
		11	Pesido	761.979.000	450.196.000
		12	Pingkuk	776.618.000	416.162.000
		13	Sugihan	894.553.000	449.768.000
10	Jatisrono	1	Gondangsari	776.357.000	474.907.000
		2	Gunungsari	812.507.000	485.173.000
		3	Jatisari	729.958.000	509.981.000
		4	Jatisrono	1.018.169.000	411.895.000
		5	Ngrompak	774.440.000	466.081.000
		6	Pandeyan	780.234.000	597.820.000
		7	Pule	751.105.000	395.405.000

		8	Rejosari	772.914.000	449.730.000
		9	Sambirejo	755.726.000	469.042.000
		10	Semen	750.875.000	455.211.000
		11	Sidorejo	1.127.464.000	474.033.000
		12	Sumberejo	1.023.086.000	430.277.000
		13	Tanggulangin	886.119.000	416.236.000
		14	Tasikhargo	770.711.000	537.089.000
		15	Watangsono	1.087.433.000	508.366.000
11	Karangtengah	1	Jeblogan	1.131.216.000	605.100.000
		2	Karangtengah	968.932.000	381.963.000
		3	Ngambarsari	907.849.000	723.171.000
		4	Purwoharjo	983.931.000	694.108.000
		5	Temboro	963.324.000	658.345.000
12	Kismantoro	1	Bugelan	1.831.280.000	487.577.000
		2	Gambiranom	882.707.000	477.805.000
		3	Gedawung	984.072.000	571.917.000
		4	Lemahbang	846.511.000	502.527.000
		5	Miri	797.915.000	483.275.000
		6	Ngroto	955.915.000	493.223.000
		7	Plosorejo	826.636.000	353.671.000
		8	Pucung	852.763.000	478.506.000
13	Manyaran	1	Bero	910.608.000	630.618.000
		2	Gunungan	1.203.444.000	839.128.000
		3	Karanglor	766.448.000	649.645.000
		4	Kepuhsari	983.152.000	702.715.000
		5	Pijiharjo	874.987.000	683.369.000

14	Ngadirojo	1	Gedong	919.747.000	644.954.000
		2	Gemawang	1.326.606.000	685.558.000
		3	Jatimarto	780.433.000	537.526.000
		4	Kerjo Kidul	908.285.000	586.309.000
		5	Kerjo Lor	1.218.348.000	765.359.000
		6	Mlokomanis Wetan	886.908.000	689.318.000
		7	Ngadirojo Kidul	878.714.000	747.931.000
		8	Ngadirojo Lor	1.168.160.000	592.129.000
		9	Pondok	878.161.000	630.412.000
15	Nguntoronadi	1	Bulurejo	763.689.000	508.391.000
		2	Bumiharjo	773.480.000	406.538.000
		3	Gebang	808.009.000	391.265.000
		4	Kulurejo	767.648.000	513.218.000
		5	Ngadipiro	772.143.000	503.349.000
		6	Ngadiroyo	741.612.000	470.858.000
		7	Pondoksari	778.104.000	474.093.000
		8	Semin	800.593.000	420.080.000
		9	Wonoharjo	809.301.000	532.695.000
16	Paranggupito	1	Gendayakan	1.100.223.000	500.538.000
		2	Gudangharjo	1.003.973.000	405.648.000
		3	Gunturharjo	808.266.000	480.864.000
		4	Johunut	1.172.750.000	454.325.000
		5	Ketos	804.770.000	562.882.000
		6	Paranggupito	902.122.000	484.063.000
		7	Sambiharjo	816.225.000	462.747.000
		8	Songbledeg	1.173.762.000	587.992.000

17	Pracimantoro	1	Banaran	806.490.000	479.611.000
		2	Gambirmanis	1.083.305.000	713.942.000
		3	Gebangharjo	789.924.000	533.765.000
		4	Glinggang	814.357.000	559.610.000
		5	Jimbar	1.371.115.000	539.798.000
		6	Joho	858.678.000	767.825.000
		7	Lebak	781.316.000	583.179.000
		8	Petirsari	893.797.000	641.271.000
		9	Pracimantoro	929.580.000	658.727.000
		10	Sambiroto	773.230.000	607.175.000
		11	Sedayu	1.261.045.000	580.982.000
		12	Suci	833.191.000	703.409.000
		13	Sumberagung	1.293.934.000	606.076.000
		14	Trukan	760.283.000	602.524.000
		15	Tubokarto	764.587.000	648.302.000
		16	Watangrejo	805.289.000	571.400.000
		17	Wonodadi	818.975.000	524.450.000
18	Puhpelem	1	Golo	1.109.745.000	476.308.000
		2	Nguneng	814.665.000	454.043.000
		3	Puhpelem	782.436.000	434.616.000
		4	Sukorejo	831.698.000	465.463.000
		5	Tengger	1.003.770.000	493.299.000
19	Purwantoro	1	Bakalan	880.695.000	541.549.000
		2	Bangsri	844.436.000	448.940.000
		3	Biting	906.732.000	444.114.000
		4	Gondang	1.485.296.000	538.773.000
		5	Joho	759.288.000	429.921.000

		6	Kenteng	793.867.000	508.247.000
		7	Kepyar	878.024.000	517.905.000
		8	Miricinde	749.623.000	370.827.000
		9	Ploso	1.349.335.000	518.110.000
		10	Sendang	784.654.000	407.638.000
		11	Sukomangu	747.503.000	415.403.000
		12	Sumber	1.229.596.000	458.490.000
		13	Talesan	863.878.000	420.073.000
20	Selogiri	1	Gemantar	739.774.000	547.825.000
		2	Jaten	1.089.172.000	631.092.000
		3	Jendi	873.227.000	586.225.000
		4	Keloran	1.123.627.000	512.796.000
		5	Kepatihan	931.180.000	479.850.000
		6	Nambangan	812.066.000	498.869.000
		7	Pare	799.630.000	653.921.000
		8	Pule	1.040.832.000	497.391.000
		9	Sendangijo	1.055.468.000	551.698.000
		10	Singodutan	886.325.000	610.369.000
21	Sidoharjo	1	Jatinom	1.117.812.000	469.271.000
		2	Kebonagung	1.107.534.000	572.556.000
		3	Kedunggupit	769.900.000	513.209.000
		4	Mojoreno	1.036.750.000	497.847.000
		5	Ngabeyan	901.961.000	499.299.000
		6	Sembukan	1.102.903.000	617.069.000
		7	Sempukerep	1.103.114.000	664.951.000
		8	Tempursari	840.045.000	580.812.000
		9	Tremes	1.052.939.000	542.185.000

		10	Widoro	836.135.000	425.428.000
22	Slogohimo	1	Gunan	1.046.711.000	503.292.000
		2	Klunggen	1.025.011.000	419.631.000
		3	Made	828.578.000	405.275.000
		4	Padarangin	1.245.364.000	451.179.000
		5	Pandan	789.797.000	410.888.000
		6	Randusari	746.584.000	439.432.000
		7	Sambirejo	757.364.000	483.481.000
		8	Sedayu	913.561.000	478.692.000
		9	Setren	977.302.000	445.587.000
		10	Slogohimo	730.505.000	464.677.000
		11	Soco	835.472.000	444.533.000
		12	Sokoboyo	830.400.000	509.008.000
		13	Tunggur	809.711.000	416.648.000
		14	Waru	932.708.000	439.482.000
		15	Watusomo	744.401.000	392.425.000
23	Tirtomoyo	1	Banyakprodo	797.718.000	527.686.000
		2	Dlepih	827.409.000	528.273.000
		3	Genengharjo	752.366.000	542.486.000
		4	Girirejo	799.588.000	728.479.000
		5	Hargantoro	966.776.000	601.163.000
		6	Hargorejo	844.977.000	459.273.000
		7	Hargosari	1.330.873.000	631.609.000
		8	Sendangmulyo	1.057.849.000	586.305.000
		9	Sidorejo	1.172.345.000	664.423.000
		10	Sukoharjo	938.371.000	597.352.000

		11	Tanjungsari	1.042.450.000	571.888.000
		12	Wiroko	770.249.000	588.417.000
24	Wonogiri	1	Bulusur	856.922.000	566.626.000
		2	Manjung	758.314.000	469.021.000
		3	Pokohkidul	870.853.000	502.561.000
		4	Purworejo	738.576.000	494.045.000
		5	Purwosari	858.642.000	615.475.000
		6	Sendang	759.148.000	430.116.000
		7	Sonoharjo	935.916.000	596.035.000
		8	Wonoharjo	782.989.000	585.723.000
		9	Wonokerto	768.004.000	565.501.000
25	Wuryantoro	1	Genukharjo	1.199.052.000	682.249.000
		2	Gumiwang Lor	876.427.000	650.249.000
		3	Mlopoharjo	928.221.000	494.149.000
		4	Pulutan Kulon	805.987.000	626.111.000
		5	Pulutan Wetan	788.940.000	579.991.000
		6	Sumberejo	788.538.000	625.630.000
JUMLAH				224.681.357.000	132.143.285.000

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wonogiri Tahun 2021)

Berdasarkan tabel diatas bahwasannya Kecamatan Girimarto yang terdiri dari 12 desa, termasuk ke dalam kecamatan yang tercatat sebagai peringkat 10 besar pendanaan dana desa terbesar se-Kabupaten Wonogiri dan Kecamatan Girimarto mendapatkan peringkat ke-5 dari 25 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Wonogiri.

Sejarah awal berdirinya sistem keuangan desa di Kecamatan Girimarto bermula dari banyaknya kendala yang sering terus berkembang, mulai dari penanggung jawab atau bendahara desa hanya satu, yang mengerjakan pekerjaan keuangan desa hanya satu orang sehingga pekerjaan menjadi lambat, pekerjaan yang tertunda dikarenakan ada pekerjaan

baru yang harus terselesaikan dahulu, sumberdaya manusia yang kurang memadai, keamanan belum 100% terjamin keamanannya dan lain sebagainya. Pada tahun 2019 Bupati Kabupaten Wonogiri mengeluarkan peraturan dengan sistem yang terbaru, dikarenakan sistem yang terbaru tersebut tergolong baru maka dalam peraturan tersebut semua kecamatan berhak memilih menggunakan metode online ataupun metode manual. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Keuangan Desa. Peluncuran peraturan terbaru tersebut adalah berbentuk aplikasi sistem keuangan desa yang dikeluarkan secara langsung oleh kementerian desa guna untuk mempermudah pekerjaan keuangan desa dan dapat terjaga keamanannya serta dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dana. Untuk pertama kalinya Kecamatan Girimartomenerapkan sistem yang terbaru, pendamping desa khususnya pendamping desa yang bertugas di Kecamatan Girimarto mengikuti pelatihan-pelatihan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang berada di wilayah Pendopo Kabupaten Wonogiri yang berpusat di kota. Setelah mengikuti pelatihan-pelatihan teknis maupun non teknis, pendamping desa Kecamatan Girimarto mengadakan pengenalan sekaligus pelatihan di Pendopo Kecamatan Girimarto yang dikhususkan untuk penanggung jawab keuangan atau bendahara desa. Setelah dilakukannya pelatihan-pelatihan secara rutin di pedopo Kecamatan Girimarto, kemudian pendamping desa yang bertugas di wilayah Kecamatan Girimarto melakukan pendampingan dan terlibat langsung ke semua desa di Kecamatan Girimarto. Pada saat pendampingan ke semua desa-desa, di beberapa desa ditemukannya kendala pengoperasian aplikasi sistem keuangan desa, fasilitas yang kurang memadai, sumberdaya manusia yang belum terpenuhi dan lain sebagainya.

Adanya sistem terbaru yang telah diterapkan di semua desa Kecamatan Girimarto, semua desa harus memahami sistem terbaru yaitu sistem aplikasi keuangan desa (siskeudes). Bendahara desa merupakan operator atau sering disebut juga sebagai penanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan desa yang pekerjaannya berada di desa tersebut, biasanya pemilihan bendahara desa ditunjuk secara langsung oleh kepala desa yang bersangkutan, tetapi bendahara desa juga bisa ditunjuk dari pusat dikarenakan adanya pergantian pemimpin sehingga setiap enam bulan sekali atau satu tahun sekali terdapat pergantian bendahara desa, yang dimana setiap enam bulan sekali atau satu tahun sekali berbeda penanggung jawab yang mengelola keuangan desa dan sebagai pengelola keuangan desa yang terbaru harus mampu menyesuaikan dan beradaptasi

dengan sistem terbaru yang telah ditetapkan oleh Bapak Bupati Kabupaten Wonogiri. Sistem terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa tersebut yang telah diterapkan Kecamatan Girimarto tersebut terdiri dari dua macam bagian yaitu bagian penganggaran dan bagian penatausahaan. Semua desa yang terdiri dari 12 desa di Kecamatan Girimarto selalu berprogress setiap bulannya, seperti pada bagian penganggaran semua desa telah selesai dalam melaksanakan tugasnya yaitu memasukan nominal anggaran ke dalam aplikasi tersebut, tetapi pada bagian penatausahaan hanya sebagian desa yang mampu menyelesaikan tugasnya yaitu hanya mampu melaksanakan sampai bulan agustus adalah Desa Sanan, Desa Tambakmerang, Desa Semagar, Desa Giriwarno, Desa Bubakan dan desa yang belum selesai adalah Desa Doho, Desa Selorejo, Desa Waleng, Desa Jatirejo, Desa Nungkulan dan Desa Girimarto serta salah satu desa yang telah selesai dari bulan januari hingga desember adalah Desa Jendi. (Sumber: *wonogirikab.go.id*)

Tabel 2.2

**Daftar Nama Bendahara Desa
se-Kecamatan Girimarto Tahun 2020**

NO	Nama Bendahara Desa	Desa	Tingkat Pendidikan
1	Siswadi	Giriwarno	S1
2	Agus Priyono	Jatirejo	SMA
3	Surono	Selorejo	SMA
4	Sutarji	Waleng	SMA
5	Tarwini	Doho	SMA
6	Sri Mulyani	Girimarto	D3
7	Dwi H	Jendi	S1
8	Nita	Nungkulan	SMA
9	Ayu	Tambak Merang	SMA
10	Retno Setyaningsih	Sanan	S1
11	Tunjung Setiawan	Semagar	D3
12	Subur	Bubakan	SMA

(Sumber: *Buku Profil Desa Kecamatan Girimarto Tahun 2020*)